

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam era globalisasi serta tuntutan reformasi yang semakin meningkat, peran akuntansi sebagai alat pencatatan semakin dibutuhkan. Perkembangan akuntansi pemerintahan tidaklah secepat akuntansi bisnis. Penyebabnya adalah karakteristik yang tidak banyak mengalami perubahan. Dengan adanya tuntutan masyarakat menyebabkan akuntansi menjadi semakin penting. Semakin besar dana yang dikelola oleh pemerintah semakin besar pula tuntutan akuntabilitas keuangan sebagai wujud transparansi keuangan dalam pemerintah.

Laporan keuangan pemerintah disusun untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan pemerintah digunakan sebagai akuntabilitas publik berupa pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Dewasa ini, praktik akuntansi sektor publik banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah banyak mendapat perhatian dibanding masa-masa sebelumnya. Akuntansi sektor publik menjadi tuntutan yang lebih besar dari masyarakat untuk dilakukan transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik. Tuntutan akuntansi sektor publik tersebut mengakibatkan perlu adanya tata kelola urusan publik yang baik.

Reformasi keuangan dan otonomi daerah telah mengubah pelaksanaan pemerintah daerah menuju tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Reformasi keuangan dilakukan pada semua tahapan proses keuangan negara dimulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan penganggaran, hingga pertanggungjawaban keuangan dan audit. Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberi tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat dituntut untuk melakukan transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangannya merupakan upaya konkrit mewujudkan *good governance*.

Di Indonesia masih sangat rendah tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Hal ini terbukti karena masih banyak kabupaten/kota di Indonesia yang masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) karena informasi dalam laporan keuangan daerahnya tidak lengkap.

Dalam kurun waktu 12 tahun di Era Reformasi, Indonesia sedang melakukan pembenahan di segala bidang, termasuk pembenahan dalam pengelolaan keuangan negara. Saat ini pemerintah dituntut untuk lebih

transparan memberikan informasi terkait pengelolaan keuangan negara pada masyarakat. Terlebih adanya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, badan publik memiliki kewajiban untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya. Laporan keuangan yang diterbitkan oleh lembaga publik merupakan barang publik yang diperoleh masyarakat.

Menurut penelitian Simbolon dan Kurniawan (2015) dalam pelaksanaan keuangan daerah dibutuhkan pencatatan dan pelaporan yang merupakan bagian dari akuntansi keuangan daerah. Akuntansi Keuangan Daerah merupakan salah satu bidang dalam Akuntansi Sektor Publik yang mendapat perhatian besar dari berbagai pihak semenjak reformasi. Reformasi keuangan daerah awalnya dilakukan dengan mengganti Undang-undang Republik Indonesia dari Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 yang menggantikan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1956 yang berkaitan dengan keuangan negara dan daerah. Kemudian diganti dengan Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayah (2017), yaitu penambahan variabel dan periode penelitian. Penambahan variabel dalam penelitian ini adalah Ukuran Pemerintah Daerah. Dengan demikian dalam penelitian ini variabel yang

diteliti meliputi, kemandirian pemerintah daerah, kekayaan pemerintah daerah, *intergovernmental revenue* dan ukuran pemerintah daerah. Periode penelitian sebelumnya yang dilakukan Hidayah (2017) pada tahun 2014-2016, sedangkan periode penelitian ini pada tahun 2015-2017.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti mengambil judul “PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, KEMANDIRIAN PEMERINTAH DAERAH, KEKAYAAN PEMERINTAH DAERAH, DAN *INTERGOVERNMENTAL REVENUE* TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH (Studi Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017).”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur?
2. Apakah kemandirian pemerintah daerah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur?

3. Apakah kekayaan pemerintah daerah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur?
4. Apakah *intergovernmental revenue* berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam rumusan masalah, penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu:

1. Menganalisis dan memberikan bukti emiris mengenai adanya pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.
2. Menganalisis dan memberikan bukti emiris mengenai adanya pengaruh kemandirian pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.
3. Menganalisis dan memberikan bukti emiris mengenai adanya pengaruh kekayaan pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.
4. Menganalisis dan memberikan bukti emiris mengenai adanya pengaruh *intergovernmental revenue* terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi beberapa pihak antara lain:

##### **1. Bagi Pemerintah Daerah**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pemerintah terkait masalah yang berhubungan dengan ukuran pemerintah daerah, kemandirian pemerintah daerah, kekayaan pemerintah daerah, dan *intergovernmental revenue* mengenai tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

##### **2. Bagi Peneliti**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis mengenai tingkat pengungkapan laporan keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

##### **3. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para pembaca sebagai referensi atau bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya dan sebagai penambah wacana keilmuan.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yang akan digunakan dalam penelitian ini untuk memudahkan pemahaman dan untuk mencapai sasaran yang diinginkan sebagai berikut ini:

## BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori yang menjadi landasan penelitian, kerangka pemikiran, dan perumusan hipotesis.

## BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi uraian tentang metode penelitian yang berisikan rincian mengenai desain penelitian, populasi dan sampel, teknik pengambilan sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, uji kualitas data, dan teknik analisis data.

## BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai analisis data dan pembahasan atas hasil analisis data.

## BAB V PENUTUP

Bab ini berisi simpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran-saran.